

**EKSISTENSI HANSIP DI SURABAYA TAHUN 1962-1982****DIAN CHRYSTIANA AGUSTIN**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
 Universitas Negeri Surabaya  
 E-Mail: [dhie.and58@gmail.com](mailto:dhie.and58@gmail.com)

**Artono**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
 Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Hansip merupakan organisasi atau wadah yang menampung partisipasi rakyat dalam rangka pembelaan negara. Kehadiran Hansip Sangat sentral dengan perjalanan hidup bangsa sesuai dengan kontribusi dan peranan yang sangat mendukung terhadap terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam perkembangannya Hansip mengalami beberapa proses refungsionalisasi oleh pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana latar belakang lahirnya Hansip di Indonesia? 2) Bagaimana Eksistensi Hansip di Surabaya tahun 1962-1982 ? metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi serta historiografi. Sedangkan metode pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kearsipan dan juga wawancara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Eksistensi Hansip di Surabaya tahun 1962-1982.

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang latar belakang lahirnya Hansip di Indonesia dimana pada waktu itu rakyat bertekad menyelesaikan perjuangan kemerdekaan. Dalam menyelesaikan perjuangan tersebut bukan hanya dibutuhkan pertahanan di barisan depan namun juga di barisan belakang untuk membantu angkatan bersenjata menghadapi serangan dari musuh. Partisipasi rakyat yang sangat tinggi di barisan belakang itulah yang kemudian dibentuklah organisasi Pertahanan Sipil. Tugasnya mengatur partisipasi rakyat untuk membela negara di bidang kemanusiaan, pemerintahan, penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum. Sedangkan keberadaan Hansip di Surabaya mengalami perkembangan dimana pada mulanya rakyat dengan sukarela ikut serta menjadi anggota hansip menjadi semakin terorganisir dengan baik dan memiliki peran-peran penting didalam kehidupan masyarakat juga ketahanan nasional.

**Kata Kunci:** Bela Negara, Pertahanan Sipil, Surabaya

**Abstract**

Hansip is an organization or container that accommodates people's participation in the framework of state defense. The presence of Hansip Very central to the nation's life journey in accordance with the contribution and role that is very supportive towards the creation of order and security in society. In its development Hansip experienced some process of refunctionalization by the government.

Based on the background of the problem then the formulation of the problem in this study are as follows: 1) What is the background of the birth of Hansip in Indonesia? 2) How is the existence of Hansip in Surabaya 1962-1982? Research methods using historical research methods consisting of four stages of heuristics, criticism, interpretation and historiography. While the method of collecting data obtained by way of literature study, archives and interviews. This study aims to describe the existence of Hansip in Surabaya in 1962-1982.

The results of this study provide knowledge about the background of the birth of Hansip in Indonesia where at that time the people determined to complete the struggle for independence. In completing the struggle not only needed defense in the front row but also in the back row to help the armed forces face the attacks of the enemy. The very high participation of the people in the back row was what then formed the Civil Defense organization. His duty is to organize people's participation to defend the state in the areas of humanity, government, disaster management and public order implementation. While the existence of Hansip in Surabaya experienced a development where in the beginning people voluntarily participated became members of the hansip become more organized and have a good role in the life of the community as well as national resilience.

**Keywords:** Defend of country , Civil Defense, Surabaya

## PENDAHULUAN

Keterlibatan rakyat dalam mempertahankan negara Indonesia dimulai jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Perjuangan rakyat Indonesia bersama TNI dalam perang kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945-1949 dengan mudahnya dikalahkan Belanda yang memiliki keunggulan teknologi. Dalam perang kemerdekaan, rakyat Indonesia menyadari pentingnya pertahanan digaris belakang yang berfungsi memperkokoh pertahanan digaris depan, maka sesuai dengan kemampuan mereka sebagian rakyat terjun dalam kegiatan tersebut.

Meskipun belum terorganisir dengan sempurna, namun kegiatan digaris depan dan garis belakang dapat berjalan selaras dan berkesinambungan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan garis belakang merupakan tugas-tugas Pertahanan Sipil diantaranya memberikan bantuan logistik, tenaga kesehatan lapangan dan melindungi masyarakat.<sup>1</sup>

Saat perang kemerdekaan berkejadian hampir diseluruh wilayah Indonesia, banyak kota yang dikuasai oleh Belanda, hal tersebut membuat pasukan Indonesia mengubah strategi pertahanan dengan menggunakan sistem "perang gerilya". Sistem tersebut mengharuskan pasukan Indonesia menghindari dari kehancuran total dengan cara masuk ke pedalaman sambil memusnahkan obyek-obyek vital, seperti fasilitas instansi perkebunan, sarana dan prasarana perhubungan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut kegiatan yang bersifat Pertahanan Sipil semakin penting, karena kegiatan-kegiatannya semakin luas diantaranya membantu terpeliharanya kelancaran roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta terpeliharanya daya tahan dan daya juang rakyat dalam berbagai keadaan

Berakhirnya perang kemerdekaan pada tahun 1950 tidak serta merta membuat kehidupan rakyat menjadi aman dan tentram. Kontak senjata masih terus terjadi di berbagai tempat. Hal tersebut dipicu oleh adanya pemberontakan-pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh beberapa golongan yang tidak setuju dengan pemerintahan republik. Pergantian kabinet pada tahun 1950-an juga mewarnai sejarah Indonesia yang membuat kondisi negara tidak stabil. Dalam keadaan seperti ini, timbul kembali spontanitas rakyat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi gangguan keamanan. Berdasarkan pengalaman pada masa perang kemerdekaan, rakyat membentuk organisasi keamanan yang bertujuan untuk lebih mengkoordinir kegiatan

mereka dalam membantu pemerintah. Adapun organisasi yang dibentuk rakyat di berbagai daerah dalam bidang keamanan diantaranya adalah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR), Organisasi Keamanan Desa (OKD), Pasukan Keamanan Desa (PKD), Pasukan Gerilya Desa (Pagar Desa) dan lain sebagainya.

Dengan bantuan rakyat akhirnya pemerintah dapat menyelesaikan masalah keamanan dalam negeri. Bersamaan dengan itu, pemerintah masih harus menyelesaikan masalah Irian Barat yang masih dijajah Belanda. Perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari jajahan Belanda yang dilakukan dengan cara diplomasi yang dimulai sejak akhir tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) berakhir dengan kegagalan, maka pemerintah terpaksa mengambil keputusan membebaskan Irian Barat melalui jalan kekerasan dengan dukungan Tri Komando Rakyat pada tahun 1961 yang berisi tuntutan pembebasan Irian Barat.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu diadakan persiapan termasuk persiapan pertahanan digaris belakang untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari musuh yang menggunakan pesawat udara. Keinginan rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjuangan membebaskan Irian Barat sangat besar, sehingga diperlukan organisasi yang secara nasional dapat mengatur dan mengarahkan kegiatan tersebut. Pemerintah pun menyadari pentingnya organisasi tersebut, maka pada tanggal 19 April 1962 dibentuklah organisasi Pertahanan Sipil yang dilandasi oleh Undang-undang No. 14 tahun 1962.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, dimana stabilitas politik dan keamanan telah mantap dan sejalan dengan usaha pemerintah dalam mengadakan refungsionalisasi aparat pemerintah, maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 dan No. 56 tahun 1972 menyatakan bahwa pembinaan organisasi Pertahanan Sipil baik di tingkat pusat maupun daerah telah dilimpahkan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, pelimpahan tersebut mempengaruhi fungsi Hansip yang semula sebagai cadangan tempur negara dan sekarang bergelut di bidang kemanusiaan. Dengan pengalihan pembinaan tersebut tidak akan mengurangi kedudukan pada peranan Pertahanan Sipil dalam sistem yang kita pakai dalam penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Nasional<sup>2</sup>. Keberadaan Hansip yang mempunyai fungsi "Perlindungan Masyarakat" sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No.20 Tahun 1982<sup>3</sup> tentang Ketentuan-

<sup>1</sup> Soemarno. 2000. Sejarah Pertahanan Sipil di Indonesia, Tugas Akhir Mata Kuliah Sejarah Hukum Program Magister Hukum Pasca Sarjana. Universitas Surabaya hlm.6

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 12

<sup>3</sup> Gunawan, FX, Rudy dan Nezar Patria. 2000. Premanisme Politik. Yogyakarta: ISAI hlm 10.

ketentuan Pokok Pertahanan, mempunyai landasan yang kuat. Substansi Linmas yang semula sebagai fungsi dalam organisasi Hansip ditingkatkan menjadi suatu organisasi dalam bentuk "Satuan Perlindungan Masyarakat" yang sekaligus dikukuhkan sebagai komponen khusus pertahanan keamanan negara dalam menunjang pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Peranan Pertahanan Sipil yang ada sejak zaman Belanda yang berbentuk sederhana hingga berkembang menjadi sempurna dari setiap periode yang ada, membuktikan bahwa badan semi militer ini memiliki kontribusi yang besar pada negara. Kondisi pertahanan dan keamanan negara yang belum stabil, dipicu oleh berbagai sebab seperti: perpolitikan negara, perekonomian, adanya isu Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA) yang menimbulkan kerusuhan dan kekerasan. Kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari tindak kekerasan, seakan-akan hal itu sudah menjadi kultur yang lahir tanpa disadari.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. metode penelitian sejarah terdise dari empat tahap, meliputi Heuristik, Kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi.<sup>4</sup> (1) Heuristik Pendekatan sejarah mempunyai empat tahapan proses penelitian, yang pertama adalah heuristik yang menjadi langkah awal dalam penelitian sejarah. Heuristik adalah proses mencari dan mengumpulkan sumber atau data. Proses heuristik, pengumpulan data dilakukan dengan dokumen, pustaka, observasi (pengamatan tidak langsung / non partisipan), dan wawancara.<sup>5</sup>

Tahap pertama, melakukan pencarian dan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, baik sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber-sumber yang ditemukan antara lain. Adapun sumber-sumber primer maupun sekunder yang telah di temukan, antara lain : Koran- koran sejaman, yakni Surabaya post 20 april 1966 mengenai empat tahun hansip, surabaya post 23 desember 1966 mengenai hansip tetap menjadi anggota ISCO, surabaya post 3 maret 1959 mengenai peraturan wajib militer, surabaya post 31 agustus 1966 mengenai pembentukan Hansip/wanra sampai ketinggian desa adalah mutlak. Beberapa sumber arsip yaitu arsip kota surabaya no 1.173 box 32 mengenai Pengumuman Penguasaan Perang Daerah, arsip kota surabaya no. 1.307 box 36 mengenai Laporan Rapat Hansip tanggal 15 september 1966, arsip kota surabaya no 1.312 box 36

mengenai pencalonan anggota Hansip/Wanra untuk pendidikan latihan kader pelaksana. Arsip kota surabaya no 1.314 box 36 mengenai pembentukan kompi Hansip/wanra di kota Surabaya mengenai pertahanan sipil. Dan juga wawancara dengan narasumber. Selanjutnya buku-buku yang berhubungan dengan pertahanan sipil.

(2)Kritik, Tahap kedua adalah kritik. Kritik merupakan pengujian terhadap sumber – sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta.<sup>6</sup> Kritik data dilakukan dengan menyeleksi, menilai, memilah dan menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui perbandingan data – data sumber lain. Data yang sudah diuji akan dijadikan bahan penulisan sejarah. Data – data yang diuji merupakan fakta yang akan dijadikan fakta yang mendekati kebenaran dan akan dijadikan sumber sejarah. Dalam hal ini sumber sekunder dibandingkan dengan sumber wawancara sehingga dengan adanya sumber – sumber tersebut penulis dapat membandingkan sumber – sumber yang relevan.

(3)Intepretasi Tahap ketiga adalah interpretasi, interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta.<sup>7</sup> Hasil sumber sejarah yang terkumpul dan dibandingkan kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan sumber buku untuk menjadi fakta sejarah. Proses ini merupakan upaya mengintepretasi fakta – fakta sejarah sesuai dengan tema penelitian. Hasil yang diperoleh peneliti dapat menemukan fakta bahwa Eksistensi Hansip di Surabaya pada tahun 1962-1982 mengalami perkembangan serta memiliki peranan penting di masyarakat.

(4) Historiografi Tahap keempat atau yang terakhir adalah historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah.<sup>8</sup> Penulis membuat sebuah penulisan sejarah dari sumber – sumber yang telah didapat dan relevan dengan tulisan yang akan dibahas. Pada tahap akhir penelitian, setelah berhasil merekonstruksi sejarah sesuai dengan tema, maka dilakukan penulisan ilmiah sebagai hasil penelitian sejarah tentang "EKSISTENSI HANSIP DI SURABAYA TAHUN 1962-1982".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertahanan keamanan negara sangat penting keberadaannya dalam tatanan kehidupan setiap bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia yang merupakan negara berkembang di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, bangsa

<sup>4</sup> Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press. hlm 10

<sup>5</sup> Koentjaraningrat.1981.*Metode - Metode Penelitian Masyarakat* .Jakarta :PT. Gramedia.Hlm.126

<sup>6</sup> Aminuddin Kasdi.2005.*Memahami Sejarah*.Surabaya:University Press. Hlm.17

<sup>7</sup> *Ibid*,hlm.11.

<sup>8</sup> *Ibid*,hlm.10-11



Indonesia mengembangkan satu sistem keamanan nasional atau SISKAMNAS yaitu: Sistem yang mewujudkan situasi dan kondisi kemampuan bangsa dalam melindungi semua sistem kehidupan nasionalnya, yang didasarkan pada system nilai internalnya sendiri, terhadap setiap ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.<sup>9</sup>

Potensi rakyat yang merupakan pangkal kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang dibentuk dan disusun dalam sistem Pertahanan Sipil. Keberadaan hansip di Indonesia dapat dilihat dari beberapa masa antara lain:

#### **Masa Kolonialisme Belanda.**

Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu organisasi untuk melawan kedatangan Jepang ke Indonesia. Organisasi sipil tersebut bertugas untuk melindungi masyarakat terhadap serangan musuh dari udara. Organisasi yang diberi nama Lucht Bescherring Diens (LBD) diatur dalam Peraturan (Staats Ordonantie) dalam Berita Negara (Staatblad) tahun 1939 No.581.<sup>10</sup>

Organisasi ini dibentuk dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat Pemerintah Sipil. Adapun kegiatan yang dilakukan organisasi ini antara lain: penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, pengungsian dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut hanya dapat dilihat di kota-kota saja dan dilakukan oleh pegawai dinas yang bersangkutan, sedangkan masyarakat masih sangat terbatas yang dikerahkan.

Program lain yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda untuk mempertahankan kota dari sekutu yaitu melatih warga sipil yang ingin menjadi penjaga kota (stadswacht) secara sukarela. Pelatihan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda merupakan bentuk mobilisasi warga sipil pertama kali dalam rangka menjaga kota-kota Indonesia.

#### **Masa Pendudukan Jepang.**

Pendudukan Jepang di Indonesia bertujuan untuk memobilisasi warga sipil khususnya pemuda untuk dikerahkan dalam Perang Asia Pasifik. Hal tersebut dilakukan karena situasi di medan pertempuran (Asia Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Madway yang terjadi pada Juni 1942 dan sekitar Laut Karang peristiwa ini terjadi pada Agustus 1942 hingga Februari 1943. Bahkan

kondisi ini diperparah dengan jatuhnya Guadacanal pada Agustus 1943 yang merupakan basis kekuatan Jepang di Asia Pasifik. Situasi tersebut membuat Jepang membentuk badan-badan militer maupun semi militer seperti: Heiho, PETA (Pasukan Pembela Tanah Air), Seinendan (Barisan Pemuda Indonesia), Keibodan (Organisasi Keamanan), Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat), dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Organisasi yang sifatnya Pertahanan Sipil yang didirikan Jepang ini lebih sempurna daripada jaman penjajahan Belanda, karena organisasi ini dirangkaikan dengan kepentingan pertahanan mereka menghadapi serangan Sekutu. Untuk dapat mengerahkan rakyat, maka organisasi ini dibentuk sampai pada lingkungan masyarakat yang terkecil dalam bentuk "tonarigumi" atau "gumi" (asosiasi lingkungan atau yang lebih kita kenal sekarang RT/RW). Tonarigumi merupakan sebuah persekutuan yang berlandaskan pada konsep-konsep tradisional Jepang. Secara umum tonarigumi tidak berbeda dengan sinoman, hanya dari sisi kelembagaannya tonarigumi tidak menyuarakan lingkungan khas setiap kampung, tetapi lebih menyuarakan kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Dalam kenyataannya tonarigumi merupakan landasan dasar dari suatu struktur piramida yang dirancang untuk membawa pemerintahan pusat masuk kedalam kampung. Setiap tonarigumi menyelenggarakan serangkaian pertemuan secara teratur dengan tujuan untuk menumbuhkan solidaritas masyarakat, serta menyebarkan berita tentang peraturan pemerintah. Sistem tonarigumi diterapkan di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan.

#### **Masa Perang Kemerdekaan.**

Perang kemerdekaan yang dimulai jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merupakan spontanitas dan titik tolak perjuangan rakyat Indonesia untuk mengakhiri penjajahan dari bumi Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat baik dalam perjuangan bersenjata baik secara langsung di medan pertempuran (kombatan) maupun digaris belakang (non kombatan) yaitu untuk menanggulangi bencana akibat perang, semua kegiatan tersebut merupakan wujud keinginan untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat.

Pada bulan September sampai Oktober 1945 tentara Sekutu mendaratkan pasukannya secara berturut-turut di Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Ambarawa, Magelang dan Surabaya untuk melecuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang Sekutu. Dalam kenyataannya, tentara sekutu menyelundupkan unsur-unsur alat penjajah Belanda yaitu NICA (Nederlands Indies Civil Administration) dengan melakukan

<sup>9</sup> Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. *Sis Vis Pacem Bllum: Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama hlm 5

<sup>10</sup> Departemen Dalam Negeri. 1977. *Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Sosial Politik hlm. 4

<sup>11</sup> Kusno, Abidin. 2007. *Penjaga Memori: Gardu Di Perkotaan Jawa*. Jakarta: Ombak hlm. 91

provokasi-provokasi yang akhirnya menimbulkan perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia.

Pada mulanya dalam pertempuran menghadapi serbuan tentara Belanda dan Inggris, perlawanan bersenjata Indonesia selalu menggunakan pertahanan linier sehingga dikenal. Dengan menyadari bahwa perjuangan digaris depan harus selalu mendapat dukungan dari garis belakang, maka sesuai dengan kemampuan masing-masing sebagian rakyat telah mengambil bagian kegiatan ini demi kokohnya pertahanan digaris depan. Meskipun pada permulaan kita belum sempat mewujudkan organisasi yang baik, tetapi sejalan dengan perjuangan dan perjalanan waktu secara berangsur-angsur kita telah dapat menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan digaris depan dan garis belakang. Kegiatan di garis belakang lebih terfokus pada bidang perlindungan masyarakat, juga melaksanakan tugas-tugas perbantuan di garis depan dalam bentuk bantuan logistik dan tenaga kesehatan lapangan. Dengan bentuk pertahanan linier tersebut ternyata bangsa Indonesia tidak mampu menghentikan apalagi menghancurkan serbuan-serbuan musuh, kecuali pada pertempuran Surabaya dan Palaga Ambarawa.

#### **Masa Revolusi.**

Setelah perang kemerdekaan selesai, pada tahun 1950 sampai tahun 1959 Rakyat Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. Sejarah bangsa Indonesia di tahun 1950-an sebagian merupakan kisah tentang kegagalan sekelompok pemimpin. Pergantian kabinet yang kerap kali dilakukan pada tahun 1950-an membuat kondisi tidak stabil. Kondisi negara yang tidak stabil karena dipicu oleh masalah politik, ekonomi dan pertahanan keamanan membuat Presiden Soekarno selaku Panglima Perang menetapkan kondisi negara dalam keadaan bahaya. Dalam memulihkan kondisi pertahanan keamanan pemerintah melibatkan seluruh aparat keamanan, namun upaya tersebut terhambat dengan terbatasnya jumlah aparaturnegara, dan terbatasnya persenjataan yang dimiliki aparaturnegara. Hal itu menimbulkan munculnya isu tentang pembentukan batalion-batalion sukarela yang telah menyebar dikalangan masyarakat.

Situasi yang dialami bangsa Indonesia membuat timbulnya spontanitas rakyat terutama didaerah-daerah dimana kaum pemberontak mengganas, secara sukarela dan penuh kesadaran yang tinggi bertekad membantu pemerintah dalam mengatasi gangguan keamanan yang menimpa di daerah masing-masing. Berdasarkan pengalaman mereka pada waktu perjuangan kemerdekaan, disusunlah organisasi-organisasi keamanan yang mereka namakan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR), Organisasi Keamanan Desa (OKD), Pasukan Keamanan Desa (PKD) dan lain sebagainya.

Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan organisasi keamanan diorganisir oleh Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) dapat diarahkan sesuai dengan operasi-operasi yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan keamanan seperti operasi PAGER BETIS, dalam rangka perjuangan TRIKORA dan DWIKORA. Sesuai dengan tugas dan kegiatannya, maka OPR ini dapat dibedakan antara OPR aktif dan OPR pasif, yang OPR aktif bertugas membantu langsung dalam operasi-operasi territorial yang pada umumnya melaksanakan tugas-tugas Pertahanan Sipil, antara lain mengatur pengungsian keluarga lemah (kaum wanita dan anak), penjagaan keamanan lingkungan, membantu kelangsungan produksi pangan dengan mengerjakan ladang-ladang yang ditinggalkan sebagian penduduk yang mengungsi, perbaikan rumah-rumah yang dibakar oleh gerombolan pemberontak dan lain sebagainya<sup>12</sup>. Organisasi inilah yang menjadi embrio lahirnya Pertahanan Sipil di Indonesia.

Setelah pemulihan keamanan dalam negeri dapat diselesaikan, rakyat Indonesia bertekad untuk menyelesaikan perjuangan kemerdekaan sesuai dengan tujuan proklamasi 17 Agustus 1945, ialah membebaskan wilayah Irian Barat yang masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Oleh karena dengan perjuangan secara damai (diplomasi) untuk menyatukan wilayah Irian Barat, ke wilayah Republik Indonesia dari kaum penjajah Belanda yang dimulai semenjak akhir tahun 1949 tidak berhasil, maka Rakyat Indonesia terpaksa akan menempuh dengan jalan kekerasan (bersenjata).

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka diadakanlah persiapan-persiapan termasuk persiapan pertahanan digaris belakang untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan itu perlu diatur organisasi untuk menampung dan mengarahkan partisipasi rakyat yang sangat tinggi dalam perjuangan. Oleh karena itu dibentuklah organisasi yang mengatur partisipasi rakyat untuk membelan negara dalam wadah dan kegiatan Perlawanan Rakyat dan Pertahanan Sipil. Pembentukan organisasi tersebut diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1962 dan pelaksanaannya diatur dengan KEP.PRES. No. 48 dan No 128 tahun 1962. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Organisasi Pertahanan Sipil sebagai wadah yang senantiasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, pemerintahan, penanggulangan bencana dan pengungsi, kegiatan bela negara maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Soemarno. 2000. *Sejarah Pertahanan Sipil di Indonesia*, Tesis Mahasiswa program Magister Hukum Pasca Sarjana. Universitas Surabaya hlm 8-9

<sup>13</sup> Departemen Dalam Negeri. 1977. *Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Sosial Politik hlm. 5.

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia menjalankan ketahanan dan perlawanan rakyat yang berbentuk Hansip atau Hanra yang bertugas memobilisasi dan mengaktifkan pertahanan rakyat di bidang mental, spiritual dan fisik. Tugas Hansip mengharuskan setiap orang untuk mengetahui tugasnya apabila terjadi bahaya secara tiba-tiba sehingga dapat menyelamatkan diri dari bencana tersebut.

#### **Kedudukan Pertahanan Sipil Dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.**

Peran dan kedudukan Hansip sangat penting dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Hankamrata. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Hankamrata sendiri menurut doktrin teritorial nusantara adalah; Pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta di mana digunakan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral dengan mengutamakan kekuatan militan sebagai unsur kekuatannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, menjamin keutuhan bangsa dan mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.

Sistem Hankamrata merupakan realisasi daripada Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. Sistem Hankamrata juga menjamin adanya demokrasi dalam pelaksanaan Pertahanan Keamanan Nasional atau Hankamnas, dengan terwujudnya integrasi antara ABRI dan Rakyat yang berarti bahwa Hankamnas adalah milik dan masalah rakyat Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam sistem Hankamrata, maka jelaslah bahwa Pertahanan Sipil berkedudukan sebagai salah satu komponen Hankamnas yang melakukan kegiatan-kegiatan non militer dan merupakan tulang punggung sistem perlindungan masyarakat terhadap bencana-bencana yang di timbulkan oleh perang, pemberontakan, alam dan industri.<sup>15</sup>

#### **Hubungan Organisasi Sipil Indonesia dengan Organisasi Pertahanan Sipil Internasional.**

Sebelum organisasi Pertahanan Sipil diresmikan oleh pemerintah, pada tahun 1960 Indonesia telah menjadi anggota International Civil Defence Organization atau ICDO<sup>16</sup> yaitu organisasi Pertahanan Sipil Internasional yang berkedudukan di Jenewa Swiss. Adapun yang menjadi pertimbangan masuknya bangsa Indonesia dalam

ICDO yaitu ICDO bersifat non politik dan tidak membedakan warna kulit dan agama, dalam usaha mengembangkan organisasi Pertahanan Sipil Indonesia mengharapkan bantuan dari ICDO maupun dari anggota ICDO dalam tukar-menukar pengalaman, tenaga ahli maupun bantuan materiil yang berupa alat-alat teknik, obat-obatan maupun sandang pangan bagi penderita akibat bencana.

Peran aktif organisasi Pertahanan Sipil dalam organisasi ICDO mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia yang ditunjukkan dengan berusaha menjadikan Jakarta sebagai Pusat Markas ICDO di Asia Tenggara. Untuk itu perlu dipenuhi beberapa syarat seperti terdapatnya beberapa atribut di markas besar, rumah sakit dan pusat pemberitaan. Saat itu Indonesia sudah memiliki tujuh atribut, sedangkan yang belum kita miliki adalah Message Center, dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh ICDO.

#### **EKSISTENSI HANSIP DI SURABAYA TAHUN 1962-1982**

##### **Kondisi Sosial Kota Surabaya.**

Kondisi Surabaya pasca revolusi kemerdekaan mengalami perkembangan yang amat pesat. Dalam beberapa segi terutama dalam sektor industri Surabaya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masa-masa rekonstruksi setelah peperangan membuat Surabaya berkembang menjadi tempat tujuan bagi masyarakat yang ingin mengadu nasibnya ke kota.

Proses urbanisasi merupakan salah satu akibat dari kemajuan-kemajuan di kota, dimana tersedia lapangan pekerjaan yang luas bagi kaum pendatang. Pada tahun 1960-an angka pertumbuhan penduduk di Surabaya menunjukkan angka pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan oleh arus masuk migran dari tempat-tempat lain yang tertarik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa keluarga migran di Surabaya telah tinggal secara menetap dan sebagian lagi ada yang berpindah-pindah. Arus masuk penduduk merupakan sebab utama kenaikan angka penduduk di Surabaya dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Timur sejak awal kemerdekaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adanya industri manufaktur dan masuknya penduduk dari daerah yang dekat dengan Surabaya seperti Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, dan kota-kota lain di Jawa Timur. Kedatangan orang-orang dari daerah ke Surabaya menambah tingginya pengangguran, gelandangan dan semakin lebarnya kesenjangan antara kelompok-kelompok pada penduduk perkotaan yang kemudian menjadi sumber pemicu berbagai permasalahan sosial seperti bertambahnya angka

<sup>14</sup> Departemen Pertahanan Keamanan. 1976. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional hlm. 67

<sup>15</sup> Departemen Dalam Negeri. 1977. *Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Sosial Politik hlm. 5.

<sup>16</sup> Hastuti, Lina. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Hansip dan Linmas Menurut Hukum Humanier Internasional*. Surabaya: Unair hlm. 14



kejahatan dan kriminalitas serta bertambahnya kemiskinan di kota.<sup>17</sup>

#### Awal Keberadaan Hansip di Surabaya

Keberadaan Hansip di Surabaya bersamaan dengan peristiwa perang kemerdekaan yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat, kegiatannya yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan ikut berpartisipasi aktif membantu angkatan perang melalui pertahanan garis belakang dalam bentuk penyelenggaraan keamanan rakyat. Meskipun belum diresmikan secara hukum oleh negara, namun perannya sangat penting dalam tercapainya kemerdekaan.

Ketika konflik antara Indonesia dengan Belanda mengenai keberadaan Irian Barat belum dapat terselesaikan di KMB, hal tersebut membuat Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden No. 315 tahun 1959 tentang pernyataan keadaan perang atas wilayah negara RI<sup>18</sup>. Keputusan presiden yang menyatakan perang untuk merebut Irian Barat disambut masyarakat dengan antusias, hal tersebut juga mendapat dukungan penuh masyarakat Surabaya pada khususnya.

Untuk keperluan tersebut, maka diadakan persiapan-persiapan pertahanan garis depan bahkan yang paling penting pertahanan digaris belakang, berbagai strategi perang disiapkan dengan matang. Dalam kondisi tersebut semua warga negara Indonesia yang berusia 18 sampai 23 tahun diharap mendaftarkan diri, dan mereka yang ditunjuk atau dipanggil untuk dinas wajib militer harus bertugas dalam ikatan selama dua tahun<sup>19</sup>. Pada tahun 1959 dibutuhkan 1500 tenaga wajib militer darurat untuk memenuhi kebutuhan pertahanan teritorial.

Dalam pengerahan partisipasi rakyat dibutuhkan organisasi untuk menampung dan mengkoordinir perjuangan mereka. Oleh karena itu organisasi yang telah menunjukkan kemanfaatannya semenjak perang kemerdekaan ditingkatkan secara nasional. Kebutuhan tersebut akhirnya disadari oleh pemerintah, maka dibentuklah organisasi Pertahanan Sipil di seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1962 tentang pemanggilan dan pengerahan warga negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara yang dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 64, 1962 yang mengatur partisipasi rakyat dalam pembelaan negara

dalam wadah dan kegiatan Perlawanan Rakyat dan Pertahanan Sipil.

Adapun yang menjadi anggota-anggota Hansip pada awal pembentukannya adalah mereka yang berpengalaman dalam bidang keamanan dan kemanusiaan serta pernah ikut dalam organisasi keamanan seperti OPR atau Organisasi Perlawanan Rakyat atau Organisasi Pertahanan Rakyat, OKD atau Organisasi Keamanan Desa, PKD atau Pasukan Keamanan Desa, Pager Desa atau Pasukan Gerilya Desa dan lain sebagainya, mengingat organisasi Pertahanan Sipil yang ada sekarang merupakan peleburan dari organisasi-organisasi keamanan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendaftarkan diri menjadi Hansip asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan<sup>20</sup>.

Kondisi keamanan yang semakin mantap dan stabil memberikan perubahan pada pelaksanaan pembinaan Hansip/Hanra. Adapun rangkaian proses kegiatan yang harus diikuti setiap warga negara untuk turut serta dalam usaha pembelaan negara yang tergabung dalam wadah organisasi Hansip diantaranya adalah: **a)** Pendaftaran, pemanggilan, dan penyaringan terhadap semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. **b)** Pendidikan dan pelatihan Hansip ditingkat pusat diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, di tingkat daerah diselenggarakan oleh Kepala Wilayah yang bersangkutan dengan bantuan teknis pembinaan dan pengawasan Departemen Hankam **c)** Penyusunan satuan tugas Hansip dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan oleh Gubernur atau Kepala Wilayah sedangkan Menteri Pertahanan Keamanan memberikan bantuan berupa teknis dan pengawasan terhadap penyusunan Hansip tersebut.<sup>21</sup>

Usaha mengoptimalkan peranan Hansip dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah daerah melakukan pelatihan yang dilakukan di tiap tingkat wilayah. Ditingkat kabupaten atau kota pelatihannya disebut sebagai Kursus Kader Pelaksana tingkat B yang dilakukan selama dua minggu di asrama. Setiap pelatihan diikuti kurang lebih seratus orang anggota Hansip yang dikirim dari perwakilan tiap kecamatan. Sedangkan untuk wilayah propinsi atau tingkat I pelatihannya adalah atau Kursus Kader Pelaksana A yang dilakukan selama dua bulan di asrama, anggota Hansip yang dikirim merupakan

<sup>17</sup> Utami, Dian. 2006. *Pekerja Wanita Migran dalam Sektor Informal Kota Surabaya Tahun 1959-1975*. Skripsi Sejarah hlm. 77

<sup>18</sup> Arsip Kota Surabaya No.1.173 Box. 32 tentang *Pengumuman Penguasa Perang Daerah*.

<sup>19</sup> Surabaya Post, 3 Maret 1959, tentang *Peraturan Wajib Militer*.

<sup>20</sup> Undang-undang No. 14 Tahun 1962 tentang *Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilitas Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara* pasal 3.

<sup>21</sup> Markas Besar Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 1992. *Kumpulan Peraturan dan Kebijaksanaan Pertahanan Markas Sipil Di Kotamadya Surabaya*. Surabaya hlm. 178

perwakilan dari setiap kota atau kabupaten. Di tingkat nasional dilakukan pelatihan Kursus Kader Pimpinan yang dilakukan selama tiga bulan di Departemen Dalam Negeri yang berpusat di Jakarta. Semakin lama organisasi Pertahanan Sipil atau Hansip mengalami perkembangan, baik dari segi organisasi maupun peranan dalam masyarakat, bahkan jumlah anggota-anggota Hansip di beberapa kecamatan mengalami peningkatan seperti yang terjadi di Kecamatan Sukolilo, Tandés, Rungkut, Wonocolo dan Karang Pilang. Hal itu terjadi karena setelah peristiwa Gestapu, pengamanan diberbagai tempat mengalami peningkatan, bahkan pemerintah kotamadya Surabaya juga mengamankan perusahaan-perusahaan penting serta obyek-obyek yang vital dengan cara menyalurkan tenaga-tenaga keamanan seperti Hansip.

Pembentukan Hansip dilakukan diseluruh wilayah di Indonesia dari tingkat propinsi hingga desa, bahkan untuk tingkat wilayah terkecil seperti kecamatan dan desa sifatnya adalah mutlak. Pembentukan Hansip tidak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat tapi juga dilingkungan kerja. Hal ini seperti yang terjadi dalam pemerintahan kotamadya Surabaya tahun 1970 yang mewajibkan semua pegawai atau pekerja kotapraja mengikuti Hansip, kecuali mereka yang sudah sangat lanjut usia atau terganggu jiwanya.

Pada tahun 1982 anggota Hansip di Surabaya tercatat 10.350 orang, dan 460 orang diantaranya Hansip wanita. Jumlah sepuluh ribu anggota Hansip tersebut penyebarannya tidak merata, ada kecamatan yang memiliki Hansip banyak dan ada yang sedikit. Hal tersebut tergantung pada masyarakatnya sendiri, seberapa besar minat mereka berperan serta di wilayahnya<sup>22</sup>.

Bagi masyarakat Surabaya, keberadaan Hansip wanita sudah tidak asing lagi. Sejak Hansip dibentuk keberadaan dan peran Hansip wanita tidak kalah dengan Hansip pria. Meskipun latihan-latihan yang diterapkan cukup keras, namun tidak menyurutkan niat para wanita untuk menggeluti profesi ini.

#### **Susunan Organisasi Hansip di Surabaya tahun 1962-1982**

Keberadaan Organisasi Pertahanan Sipil atau Hansip sebenarnya sudah ada sejak dulu dan telah terorganisir dengan sederhana. Menurut data yang penulis dapat susunan organisasi Pertahanan Sipil Kota Praja Surabaya sudah dibentuk sebelum organisasi tersebut diresmikan oleh pemerintah pusat. Adapun susunan organisasinya terdiri atas: 1).Komandan Pertahanan Sipil Kota Praja Surabaya yang merupakan Komandan bertugas mengkoordinasi pertahanan non militer yang merupakan

bagian integral dari sistem pertahanan nasional dan memimpin penyelenggaraan pengerahan segala sumber potensi guna turut serta menjamin keamanan dan memperkuat pertahanan. Dalam menjalankan tugas Komandan Pertahanan Sipil Kota Praja Surabaya dibantu oleh: Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Surabaya, Kepala Polisi Inspeksi Daerah Kota Besar Surabaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. 2).Kepala Staf Pertahanan Sipil Kota Praja Surabaya adalah KASI V (Partterpra) KMKB Surabaya yang bertugas membantu komandan dalam melaksanakan tugas serta melakukan pimpinan harian dan mengkoordinasi staf umum dan staf teknik. Selain itu Kepala Staf Pertahanan Sipil ditugasi menjadi wakil komandan apabila beliau berhalangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Staf Pertahanan Sipil dibantu oleh staf umum dan staf teknik. 3) Staf umum merupakan unsur perencanaan dan membantu komandan dalam melaksanakan tugas. 4) Staf teknik bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam rangka pelaksanaan Pertahanan Sipil yang diatur dengan ketentuan:a) Bertindak sebagai penasihat teknis terhadap komandan atau kepala Pertahanan Sipil. b) Bertindak sebagai komandan atau kepala anggota-anggota yang dibawah kekuasaan masing-masing. c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dalam bidang Pertahanan Sipil langsung kepada komandan atau kepala staf Pertahanan Sipil<sup>23</sup>.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, dimana stabilitas politik dan keamanan telah mantap, pemerintah mengadakan refungsionalisasi dalam Organisasi Pertahanan Sipil. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1972, dimana Organisasi Pertahanan Sipil dibentuk diseluruh wilayah Indonesia dan disusun berdasarkan pada pembagian administrasi pemerintah dan vitalitas suatu daerah dari kepentingan Hankamnas. Bahkan untuk mencapai efisiensi dalam pembinaan dan pengerahan Pertahanan Sipil, sejak tanggal 30 September 1972 berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 56 tahun 1972 pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil baik ditingkat Pusat maupun di tingkat daerah telah dilimpahkan dari Departemen Hankam kepada Departemen Dalam Negeri. Dengan adanya peralihan pembinaan tersebut, maka pada perkembangan selanjutnya Hansip lebih banyak melakukan fungsi dibidang kemanusiaan.

Pertahanan Sipil secara tersendiri dan bersifat khusus berdasarkan penilaian vitalitas suatu daerah atau proyek dari segi kepentingan Nasional. Organisasi Pertahanan Sipil di daerah atau proyek vital tersebut merupakan Markas Distrik Pertahanan Sipil dengan ketentuan bahwa

<sup>22</sup> Surabaya Post, 19 April 1982, tentang *Idealnya Hansip 5% Jumlah Penduduk*

<sup>23</sup> Jawa Post, 2 April 1962, tentang *Susunan Organisasi Pertahanan Sipil*.



Markas Distrik Pertahanan Sipil secara terorganisir berada di bawah Markas Daerah Pertahanan Sipil dan pimpinan daerah atau proyek yang bersangkutan menjadi Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil.

Dalam perkembangannya organisasi Pertahanan Sipil/Hansip mengalami penyempurnaan, hal ini terjadi terkait kondisi negara yang sering mengalami pergolakan yang terjadi akibat ancaman maupun hambatan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penyempurnaan organisasi tersebut berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1982 Organisasi Pertahanan Sipil disempurnakan menjadi Organisasi perlindungan Sipil atau Linmas yang mencakup organisasi Hansip, Kamra, dan Wanra.<sup>24</sup>

#### **Kegiatan Hansip di Surabaya Tahun 1962-1982**

Berdasarkan Keputusan Presiden No.55 tahun 1972, maka tugas pokok Hansip adalah:

“merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat bencana perang, pemberontakan, alam, industri, dan mempertinggi ketahanan nasional pada umumnya serta home front yang kokoh kuat pada khususnya membantu dan memperkuat pelaksanaan keamanan rakyat semesta.”<sup>25</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka disetiap struktur organisasi Hansip dibentuk kegiatan dan pengerahan Hansip yang berdasarkan pada tingkat wilayah daerah. Adapun kegiatan Hansip di bidang sosial diantaranya adalah pengerahan Hansip Surabaya dan Hansip Jatim dikirim ke Lamongan untuk membantu para korban banjir dan bersama-warga setempat Hansip melakukan kerja bakti dengan membersihkan sampah dan membangun bendungan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Hal ini dilakukan mengingat musim penghujan telah datang.<sup>26</sup>

Selain kegiatan sosial Hansip juga membantu menyukseskan pemilu pada setiap periodenya. Dalam rangka pengamanan pemilu 1982 di Surabaya akan dikerahkan 14.648 orang yang terdiri atas Keamanan rakyat sebanyak 3.270 orang sebagai membantu Pengamanan Langsung yang bekerjasama dengan Polri dalam hal ini Komandan Wilayah Kepolisian 101 Kota Besar Surabaya yang bertanggung jawab, 450 orang

Perlawanan Rakyat bantuan tidak langsung dalam hal ini tanggung jawab diberikan pada Dan Rem 084 Bhaskara Jaya, Hansip yang akan bertugas di TPS-TPS sebanyak 7.508 orang, di PPS atau Kecamatan sebanyak 160 orang, di kelurahan-kelurahan sebanyak 3.260 orang.<sup>27</sup>

Dalam rangka mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat, Hansip Simo Gunung Barat III bersama warga bergotong royong membangun pos Hansip. Hal tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan keikutsertaan langsung warga dalam membantu wilayah dengan upaya penciptaan keamanan swakarsa.<sup>28</sup>

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas Hansip juga mempunyai peran penting diantaranya adalah:

#### **a. Peran Hansip di Bidang Perlindungan Masyarakat**

Dalam rangka Konfrontasi mengganyang Malaysia pada tanggal 7 Februari 1964 angkatan udara akan melakukan latihan serangan udara khususnya di daerah kabupaten Surabaya dan Bangkalan. Oleh karena itu Hansip menyerukan pada masyarakat agar tenang dan diminta untuk segera melapor kepada Markas Hansip yang terdekat apabila mengetahui benda jatuh, diharapkan tidak mendekat dan memegang benda tersebut.<sup>29</sup> Markas Hansip Jatim pada tanggal 24 September 1964 mengeluarkan seruan dalam rangka kesiagapan masyarakat sewaktu ada bahaya udara, maka kepada seluruh masyarakat dan anggota Hansip diharapkan perhatiannya terhadap hal-hal seperti berikut: 1) Bagi toko-toko, apabila terjadi bahaya udara diharap segera mematikan lampu-lampu luar, sedangkan lampu dalam supaya dipersiapkan sebelumnya dengan cerobong hitam sehingga tidak sampai bersinar keluar. Bagi para pengunjung toko supaya keluar dengan tertib melalui pintu yang sudah disediakan, setelah semua pengunjung keluar maka lampu-lampu dimatikan, 2) Apabila ada tanda bahaya udara, diminta agar orang-orang tidak berjalan dan berkeliaran di jalan-jalan, tetapi segera ketepi jalan dan mencari perlindungan yang terdekat. Yang masih di perbolehkan jalan adalah petugas yang memakai ban lengan bertuliskan PBU dengan stempel dari Markas Daerah Pertahanan Sipil atau Markas Sektor Pertahanan Sipil, 3) Bagi semua kendaraan bila sudah ada tanda bahaya supaya segera berhenti dan berlindung di tepi jalan hingga tidak terlihat dari udara. Jika dipandang perlu diperbolehkan parker diatas trotoar. Yang masih diperbolehkan jalan hanyalah kendaraan-kendaraan dari angkatan bersenjata dan kendaraan yang mempunyai tanda komando bahaya udara berbentuk segitiga sama

<sup>24</sup> Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 1992. *Kumpulan Peraturan dan Kebijakan Pertahanan Markas Sipil Di Kotamadya Surabaya*. Surabaya hlm. 7

<sup>25</sup> Departemen Dalam Negeri, 1977, *Pertahanan Sipil Dan Perlindungan Masyarakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Sosial Politik hlm 11

<sup>26</sup> Surabaya Post, 20 April 1968, tentang *Hansip Jatim Diperintahkan Utamakan Membangun Daerahnya*.

<sup>27</sup> Jawa Post, 19 Maret 1982, tentang *14.648 Hansip Siap Mensukseskan Pemilu*.

<sup>28</sup> Jawa Pos, 25 April 1981, tentang *Warga Simo Gunung Barat III Bangun Pos Hansip*

<sup>29</sup> Surabaya Post, 7 Februari 1964, tentang *Latihan Serangan Udara*.

kaki berukuran 25cm dengan stempel Markas Daerah Pertahanan Sipil.

b. Bidang ketahanan nasional Saat operasi panca bala diadakan untuk mengecek kesiapan dan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan serta seluruh unsur pertahanan udara yang terdapat dalam keempat angkatan bersenjata termasuk Hansip serta masyarakat Jawa Timur. Pertahanan Sipil adalah tugas nasional dan seluruh rakyat bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pada saat ada tanda bahaya udara, maka setiap orang wajib mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan pada petugas Hansip. Setiap anggota Hansip disaat ada tanda bahaya udara harus tegas melakukan tugasnya dalam menertibkan lalu lintas di jalan. Diharapkan masyarakat mentaati petunjuk peraturan yang berlaku pada saat ada tanda bahaya udara.<sup>30</sup> Pengumuman tersebut disebar pada tanggal 25 Maret 1965.

Dalam rangka operasi panca bala Markas Daerah Pertahanan Sipil Jawa Timur dan Markas Sektor Pertahanan Sipil Kota Praja Surabaya pada tanggal 26 Maret 1965, berlangsung kesibukan dan kesiap-siagaan di Markas Daerah Pertahanan Sipil Jawa Timur yang berada di gedung negara jalan Pemuda yang merupakan pusat dari segala kegiatan Hansip di wilayah Jawa Timur. Pada sebuah peta wilayah Jawa Timur dapat diketahui secara organisatoris kedudukan dari pada Markas Sektor yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Pada peta Surabaya dapat diketahui letak pos-pos PPPK, pos-pos Hansip, dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan kegiatan Hansip, salah satu bagian lainnya mengikuti siaran Markas Daerah Hansip melalui siaran radio RRI juga punya hubungan telekomunikasi dengan unsur-unsur Hansip.

Pengabdian Hansip/Wanra yang penuh tanggung jawab dalam membantu ABRI melaksanakan OPERASI TRISULA di Blitar Selatan, telah memberikan perbaikan keamanan dan ketertiban, bahkan yang paling penting kegiatan tersebut telah memberikan dampak secara moril maupun psikologi pada sisa-sisa anggota Gestapu.

c. Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa Pancasila, maka unsur Hansip/Wanra dilibatkan dalam kegiatan tersebut, selain itu Hansip juga dikerahkan dalam operasi Bakti Kodim 0830 pada tanggal 13 Oktober 1971 dengan obyek penghijauan di daerah Tandes.<sup>31</sup>

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kotamadya Surabaya yang ke-60 yang berlangsung pada tanggal 1 April 1966, yang dipenuhi dengan menggelar

acara-acara khusus. Untuk menunjang keamanan dan kelancaran acara tersebut maka perlu mengerahkan tenaga Hansip dan melibatkan Kamatrik I/1130 (PPN Gula), Kamatrik VIII/1130 (Pelot Projok I), Kamatrik XIV/1130 (Pelni Gabungan), Kamatrik XXXII/1130 (Satya Niaga). Setiap Kamatrik diharuskan mengerahkan 1pleton tenaga Hansip, dan masing-masing utusan Danton yang ditunjuk akan diberi penjelasan lebih lanjut oleh Masek. Pada tanggal 24 Mei 1971 untuk pengamanan 10 TPS tambahan di kantor kotamadya Surabaya telah dipersiapkan 1 pleton Satgas Hansip/Wanra dengan kekuatan 30 orang anggota. Penggerakan tenaga Hansip tersebut untuk menyukseskan pemilu yang berlangsung lima tahun sekali.<sup>32</sup>

#### **Kesejahteraan Anggota Hansip tahun 1962-1982**

Menjadi Hansip bagi setiap orang adalah panggilan hati dan pengabdian pada negara secara sukarela, meskipun ada sebagian orang yang menganggap Hansip merupakan salah satu profesi yang tidak sepopuler TNI maupun polisi. Meskipun tugas dan perannya sangat penting dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, namun kesejahteraan hidup yang diperolehnya sangat tidak sebanding dengan tugasnya. Hal tersebut ditandai dengan minimnya jumlah Hansip baik desa maupun kota.

Menurut data yang penulis peroleh dalam satu wilayah, idealnya 5 persen dari jumlah penduduk aktif dibidang Pertahanan Sipil atau Hansip. Tetapi selama ini hanya sebagian kecil masyarakat yang bersedia menjadi anggota Hansip. Gaji yang diperoleh Hansip tiap daerah berbeda, semua tergantung pada APBD tiap daerah. Jika APBD daerah tersebut besar maka kesejahteraan hidup Hansip dapat terjamin, dan hal sebaliknya terjadi apabila APBD daerah tersebut kecil. Untuk wilayah kotamadya Surabaya kesejahteraan hidup yang diperoleh Hansip sudah cukup bisa dinikmati meskipun belum merata. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Surabaya sebagai kota besar kedua setelah Jakarta, dan mengingat Surabaya sebagai kota dagang dan industri yang memiliki APBD yang cukup besar.

Menjadi Hansip memang tidak bisa menjamin kesejahteraan hidup, namun bagi seorang Hansip dengan profesi tersebut mereka dapat mengabdikan pada bangsa dan negara. Rasa nasionalisme yang tinggi tersebut memang tidak dimiliki semua orang, bagi sebagian orang menjadi Hansip merupakan pekerjaan yang harus dijalani dari pada menganggur. Tingginya jumlah penduduk Surabaya berdampak pada jumlah pengangguran yang

<sup>30</sup> Surabaya Post, 25 Maret 1965, tentang *Mengikuti Latihan Bahaya Udara Operasi Panca Bala*

<sup>31</sup> Arsip Kota Surabaya No.1.326 Box 36, tentang *Pengerahan Hansip Untuk Pembangunan Desa Pancasila*.

<sup>32</sup> Arsip Kota Surabaya No. 1.322 Box 36, tentang *Pengerahan Tenaga Hansip/Wanra Untuk Mengamankan Pemilu*

membuat sebagian orang memutuskan berprofesi menjadi Hansip sebagai pekerjaan utama maupun sampingan.

### **Pelanggaran-pelanggaran Yang Dilakukan Hansip Di Surabaya tahun 1962-1982**

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pendukung ketertiban dan keamanan masyarakat, tidak jarang Hansip melakukan pelanggaran-pelanggaran baik secara pidana maupun perdata akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam ruang lingkup organisasi, maka pihak organisasi akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adapun beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan Hansip Kotamadya Surabaya diantaranya adalah: Kasus pengrusakan Pos Kamling di Jl. Pucang Jajar dan mengkapak rumah Moesdianto, koordinator keamanan RW 02 Pucang Anom Timur serta mengancam akan membunuhnya. Kejadian tersebut berawal dari rencana pemecatan terhadap pelaku perusakan pos kamling yang dianggap tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya menjadi Hansip dan sering membolos, bahkan sering terlibat dalam perjudian kecil-kecilan<sup>33</sup>. Kasus tembakan seorang Hansip yang nyasar membawa korban dua orang.

### **Dampak Keberadaan Hansip Di Surabaya.**

Bagi masyarakat Surabaya pada umumnya keberadaan Hansip sangat mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah kejahatan dilingkungan masyarakat yang menerapkan ronda maupun siskamling yang dijaga Hansip. Selain sebagai penjaga keamanan, Hansip juga berperan dalam suksesnya program pemerintah diantaranya adalah pemilu. Bahkan Hansip berperan besar dalam bidang kemanusiaan seperti perlindungan masyarakat bari berbagai bencana seperti bencana alam dan lain sebagainya.

Namun bagi beberapa orang keberadaan Hansip merupakan salah satu bentuk militerisme dalam masyarakat sipil. Sebenarnya wacana ini sudah berlangsung lama sejak jaman Orde Baru, tapi karena pada saat itu demokrasi tidak bisa terbuka, sehingga hal ini baru muncul. Kehadiran Hansip ditengah-tengah masyarakat hampir sama dengan satuan tugas atau Satgas bentukan beberapa partai yang membedakan hanyalah lingkup kegiatan, dimana pengabdian dan kegiatan Hansip diperuntukkan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang setiap saat dapat dapat kita jumpai keberadaannya, sedangkan satgas bentukan partai lingkup kegiatannya lebih sempit dibandingkan Hansip dan mereka dapat kita jumpai ketika menjelang pemilu atau waktu kampanye untuk menarik simpati

masyarakat. Selain Hansip dan satgas bentukan partai, juga ada Menwa yang merupakan perwujudan Sishankamrata. Menwa menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sipil dalam persiapan perang sebagai upaya menjaga dan mempertahankan keselamatan negara<sup>34</sup>.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan:**

Sejak Indonesia merdeka, kondisi negara belum menunjukkan perbaikan khususnya dalam hal pertahanan keamanan. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keamanan pemerintah membentuk organisasi Pertahanan Sipil yang keberadaan dan mafaatnya sudah dirasakan sejak perang kemerdekaan. Organisasi Pertahanan Sipil yang pada awalnya merupakan organisasi keamanan yang terdiri atas OPR, OKD, PKD, Peger Desa dan lain sebagainya, yang bergelut dalam pertahanan garis belakang dengan kegiatan membantu pertahanan garis depan dalam bentuk bantuan logistik dan tenaga kesehatan lapangan. Ketika bangsa Indonesia menyelesaikan persoalan Irian Jaya, maka diperlukan persiapan-persian termasuk persiapan pertahanan sipil untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari musuh dengan menggunakan pesawat udara. Untuk itu diperlukan organisasi yang menampung dan mengatur partisipasi rakyat yang sangat tinggi dalam perjuangan, maka dibentuklah organisasi Pertahanan Sipil yang berdasarkan pada Undang-undang No. 14 tahun 1962. Hansip dibentuk di seluruh wilayah di Indonesia, dan anggotanya diangkat dari masyarakat. Organisasi Pertahanan Sipil bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keamanan dan keteraturan dan harus membantu rakyat di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi darurat.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, dimana stabilitas politik dan keamanan telah mantap dan sejalan dengan usaha pemerintah dalam mengadakan refungsionalisasi aparat keamanan, maka untuk mencapai efisiensi dalam pembinaan dan penggerahan potensi Pertahanan Sipil tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 dan No. 56 tahun 1972, pembinaan Pertahanan Sipil baik ditingkat pusat dan daerah telah dilimpahkan dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri. Pelimpahan pembinaan tersebut berdampak pada fungsi Hansip yang pada awal pembentukannya ditujukan pada bantuan tempur, dan dalam perkembangan selanjutnya hansip lebih banyak melaksanakan fungsi kemanusiaan. Adapun kegiatan Hansip setelah adanya kebijakan tersebut

<sup>33</sup> Surabaya Post, 4 Oktober 1981, tentang *Pengrusakan Pos kamling Yang Dilakukan Seorang Hansip*.

<sup>34</sup> Dwipayana, Ari Aagn. 2000. *Masyarakat Pasca Militer: Tantangan Dan Peluang Demiliterisasi Di Indonesia*. Yogyakarta: IRE hlm. 48



diantaranya adalah membantu korban bencana alam, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan yang terwujud dalam kegiatan ronda atau siskamling, menjaga keamanan di TPS-TPS ketika berlangsungnya pemilu, dan lain sebagainya.

Perkembangan organisasi Pertahanan Sipil/Hansip tidak berhenti begitu saja, hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang berdasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 1982 yang mengatur tentang penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil menjadi Organisasi perlindungan Sipil atau Linmas yang mencakup organisasi Hansip, Kamra, dan Wanra.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seringkali Hansip harus menerima resiko pekerjaan yang cukup berat, bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Hal ini tidak sesuai dengan gaji atau kesejahteraan yang diterima Hansip, namun hal ini tidak berubah hingga sekarang. Akibat minimnya kesejahteraan Hansip, mengakibatkan sedikitnya orang mau menjadi Hansip.

#### Daftar Pustaka

##### SUMBER ARSIP:

Arsip Kota Surabaya No. 1.173 Box. 32, Surabaya 1 Mei 1960, tentang pengumuman penguasa perang dimana semua tenaga insinyur dan tamatan STM/STN dalam daerah Jawa Timur, kecuali mereka yang sekarang ini sedang menjalankan dinas aktif dalam angkatan perang sebagai militer sukarela maupun wajib militer darurat.

Arsip Kota Surabaya No. 1.303 Box. 36, Surabaya 1 Juli 1965, tentang pengumuman yang menyatakan bahwa semua pegawai atau pekerja kota praja Surabaya diwajibkan mengikuti Hansip kecuali mereka yang sudah berusia lanjut atau dalam kondisi kesehatannya terganggu.

Arsip Kota Surabaya No. 1.304 Box. 36, Surabaya 25 Januari 1966, tentang pelatihan yang dilakukan selama empat minggu sangat kurang untuk menyempurnakan latihan, maka dibutuhkan waktu perpanjangan latihan selama sepuluh hari.

Arsip Kota Surabaya No. 1.305 Box. 36, Surabaya 25 Maret 1966, tentang pengerahan tenaga Hansip/Wanra untuk penjagaan keamanan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Surabaya ke-60.

Arsip Kota Surabaya No. 1.325 Box. 36, Surabaya 26 Maret 1969, tentang penangkapan dua orang pencuri kabel arde listrik milik PLTU yang terletak di wilayah Asemrowo Kecamatan Tandes.

Arsip Kota Surabaya No. 1.314 Box. 36, Surabaya 30 April 1970, tentang daftar nama pegawai

urusan/bagian/dinas perbendaharaan menjadi anggota Mares Hansip/Wanra 1130 Kotamadya Surabaya.

Arsip Kota Surabaya No. 1.319 Box. 36, Surabaya 5 Mei 1970, tentang pembebasan pencalonan empat orang pegawai untuk menjadi Hansip/Wanra Markas Resort Hansip/ Wanra 1130 Kotamadya Surabaya.

Arsip Kota Surabaya No. 1.317 Box. 36, Surabaya 12 Desember 1970, tentang pembentukan Hansip di perusahaan air minum Kotamadya Surabaya yang terdiri dari karyawan-karyawan perusahaan tersebut.

Arsip Kota Surabaya No. 1.322 Box. 36, Surabaya 24 Mei 1971, tentang pengamanan 10 TPS tambahan dikantor Kotamadya Surabaya telah dipersiapkan 1 pleton Hansip/Hanra dengan kekuatan 30 orang anggota.

##### SUMBER KORAN DAN MAJALAH:

Surabaya Post, 3 Maret 1959 tentang Peraturan Wajib Militer.

Surabaya Post, 9 Maret 1959 tentang Wajib Militer Darurat

Surabaya Post, 24 September 1964 tentang Seruan Markas Daerah Pertahanan Sipil

Surabaya Post, 25 September 1964 tentang Seruan Markas Daerah Pertahanan Sipil: Berlindunglah Waktu Bahaya Udara.

Surabaya Post, 25 maret 1965 tentang Mengikuti Latihan Bahaya Udara Operasi Panca Bala

Surabaya Post, 26 Maret 1965 tentang Mengikuti Panca Bala.

Surabaya Post, 9 Juli 1965 tentang Tembakan Stegun Seorang Hansip Nyasar Membawa Dua Orang Korban.

Surabaya Post, 20 April 1966 tentang Empat Tahun Hansip/Hanra

Surabaya Post, 6 Juni 1966 tentang Operasi Hansip ke Gunung Kelud.

Surabaya Post, 17 Juni 1966 tentang Hansip/Hanra Jatim Akan Bekerja Mencegah Timbulnya Bencana Alam.

Surabaya Post, 31 Agustus 1966 tentang Pembentukan Hansip/Wanra Sampai Ketingkat Desa Adalah Mutlak.

Surabaya Post, 27 April 1967 tentang Camat, Hansip, GP Ansor, Membantu Gerakan Bulan Dana PMI.

Surabaya Post, 22 Juni 1967 tentang Hansip Abdullah Ditusuk

Surabaya Post, 23 Desember 1966 tentang Hansip Tetap Anggota ICDO

Surabaya Post, 20 April 1968 tentang Hansip Jatim Diperintahkan Utamakan Membangun Daerahnya

Surabaya Post, 10 Oktober 1980 tentang Keamanan Jatim Terkendali Dengan Baik, Hansip Efektif Sekali.

Surabaya Post, 4 Oktober 1981 tentang Pengerusakan Pos Kamling Yang Dilakukan Oleh Hansip.

Tempo, 2 Januari 1982 Tentang Suka Duka Hansip Wanita

Jawa Pos, 2 April 1962 tentang Susunan Organisasi Pertahanan Sipil

#### SUMBER PUSTAKA

Dwipayana, Ari Aagn. 2000. Masyarakat Pasca Militer: Tantangan Dan Peluang Demiliterisasi Di Indonesia. Yogyakarta: IRE.

Colombijn, Freek, et.al (ed). 2005. Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Kemerdekaan. Jogjakarta: Ombak.

Departemen Pertahanan Keamanan. 1976. Ketahanan Nasional. Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional.

Departemen Dalam Negeri. 1977. Pertahanan Sipil Dan Perlindungan Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jendral Sosial Politik

Frederick, William H. 1989. Pandangan dan gejala Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia: Surabaya 1926-1946. Jakarta: PT. Gramedia.

Gottschalk, Luis. Nugroho Notosusanto (Penerjemah). 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Gunawan, FX, Rudy dan Nezar Patria. 2000. Premanisme Politik. Yogyakarta: ISAI

Isnaeni, Hendri. F. dan Apid. 2008. Romusha: Sejarah Yang Terlupakan, 1942-1945. Yogyakarta: Ombak.

\_\_\_\_\_, 1992, Kumpulan Peraturan dan Kebijaksanaan Pertahanan Markas Sipil Di Kotamadya Surabaya, Surabaya: Markas Besar Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Kusno, Abidin. 2007. Penjaga Memori: Gardu Di Perkotaan Jawa. Jakarta: Ombak.

Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi Dan Kontrol. Jakarta: Grasindo.

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Soewito. 1994. Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan 2. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara Yang Modern Dan Efektif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sundhaussen, Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES.

#### SUMBER MAKALAH

Fallezi, Oriana. 2007. Problem Kriminalitas Di Surabaya tahun 1950-1966. Skripsi Sejarah

Hanstuti, Lina, 2002, Perlindungan Hukum Bagi Hansip dan Linmas Menurut Hukum Humanier Internasional, Surabaya: Unair

Soemarno, 2000, Sejarah Pertahanan Sipil di Indonesia, Tesis Mahasiswa program Magister Hukum Pasca Sarjana. Universitas Surabaya.

Utami, Dian 2006, Pekerja Wanita Migran dalam Sektor Informal Kota Surabaya Tahun 1959-1975, Skripsi Sejarah.

